

Peran Kerja sama Pemerintah Daerah Dengan Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia

Oleh:

¹ Fitri Rohmalia; ² Vidya Imanuari Pertiwi

^{1,2}. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email. fitri.rohmalia2612@gmail.com

Abstrak

Sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah Kabupaten Subang perlu ada upaya khusus dari pemerintah, Hal itu tidak lepas dari peran Pemda Subang. Namun Pemda memiliki keterbatasan dalam memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat sehingga perlu menjalin Kerjasama. Dalam pengembangan kualitas SDM, Pemda Subang melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi. Hal ini juga sejalan dengan LLDIKTI wilayah IV sebagai pengelola Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran kerja sama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan kualitas SDM di Subang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada peran kerjasama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan kualitas SDM di Subang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang ini bersama LLDIKTI Wilayah IV telah melaksanakan perannya sesuai teori yang ada. Hal tersebut dibuktikan melalui beberapa indikator peran kerja sama sebagai stabilisator, inovator, modernisator dan pelopor melalui fasilitasi kerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang membantu menciptakan SDM yang terampil, berdaya saing dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Kerja Sama; Pemerintah Daerah; Perguruan Tinggi; Kualitas Sumber Daya Manusia

Abstract

As an area with a low Human Development Index (HDI), Subang Regency needs special efforts from the government. This cannot be separated from the role of the Subang Regional Government. However, the Regional Government has limitations in providing education and training for the community so it is necessary to establish cooperation. In developing the quality of human resources, the Subang Regional Government collaborates with universities. This is also in line with LLDIKTI region IV as the manager of higher education institutions in the West Java region. The aim of this research is to explain the role of cooperation between the Regional Government and Universities in developing the quality of human resources in Subang. The research method used is descriptive qualitative research. This research focuses on the role of cooperation between the Regional Government and Universities in developing the quality of human resources in Subang. The data sources used are primary and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results show that the Subang Regency Government together with LLDIKTI Region IV have carried out their roles according to existing theory. This is proven through several indicators of the role of cooperation as stabilizers, innovators, modernizers and pioneers through facilitating cooperation in implementing the Tridharma of Higher Education which helps create human resources who are skilled, competitive and able to keep up with technological developments

Keywords: cooperation; Local Government; College; Quality of Human Resources

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan utama dalam pembangunan suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan kunci keberhasilan

dalam menghadapi tantangan di era globalisasi dan kemajuan teknologi . Hidayat dan Delyuzer dalam Azizah (2013) menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia sebagai subjek pembangunan daerah. Maka kualitas SDM menjadi kunci keberhasilan Pembangunan daerah. Pembangunan suatu daerah telah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM sangat diperlukan sebab sebagai pemangku kebijakan dengan mengintegrasikan peran dan fungsi masing-masing untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mempercepat dan memperluas penciptaan SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan dunia internasional. Kini Pemerintah daerah semakin tanggap dalam mengupayakan penciptaan regulasi pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatkan sarana prasarana Pendidikan, mengoptimalkan sistem Pendidikan, dan program-program pelatihan untuk masyarakat.

Adapun gambaran mengenai pengukuran kualitas SDM sebagai faktor utama dalam yaitu melalui pendekatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini terdiri dari tiga dimensi yaitu : (1) pendidikan yang diukur dari tingkat angka melek huruf dan tingkat Pendidikan tertinggi, (2) kesehatan diukur dari angka harapan hidup (3) pendapatan penduduk yang diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (BPS, 2022). Menurut penjelasan sebelumnya, aspek yang paling penting adalah pendidikan. Bentuk investasi dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan sosial salah satunya adalah pendidikan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal termasuk pendidikan tinggi. Menurut data IPM yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat memiliki IPM masuk 10 besar Provinsi se-Indonesia (Badan Pusat Statistika, 2022), tetapi salah satu daerahnya ada yang masih di bawah rata-rata yaitu Kabupaten Subang. Pengukuran tersebut berdasarkan tingkat IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020-2022 Kab/Kota se-
Provinsi. Jawa Barat**

No	Kab/Kota	2020	2021	2022	No	Kab/Kota	2020	2021	2022
1	Kota Bandung	81.51	81.96	82.50	15	Kab. Karawang	70.66	70.94	71.74
2	Kota Bekasi	81.50	81.95	82.46	16	Kab. Ciamis	70.49	70.93	71.45
3	Kota Depok	80.97	81.37	81.86	17	Kab. Bogor	70.40	70.60	71.20
4	Kota Cimahi	77.83	78.06	78.77	18	Kab. Kuningan	69.38	69.71	70.16
5	Kota Bogor	76.11	76.59	77.17	19	Kab. Cirebon	68.75	69.12	70.06
6	Kota Cirebon	74.89	75.25	75.89	20	Kab. Subang	68.95	69.13	69.87
7	Kota	74.21	74.60	75.40	21	Kab.	68.08	68.29	69.04

	Sukabumi					Bandung Barat			
8	Kab. Bekasi	74.07	74.45	75.22	22	Kab. Pangandaran	68.06	68.28	69.03
9	Kota Tasikmalaya	73.04	73.31	73.83	23	Kab. Majalengka	67.59	67.81	68.56
10	Kab. Bandung	72.39	72.73	73.16	24	Kab. Indramayu	67.29	67.64	68.55
11	Provinsi Jawa Barat	72.09	72.45	73.12	25	Kab. Sukabumi	66.88	67.07	67.64
12	Kota Banjar	71.70	71.92	72.55	26	Kab. Garut	66.12	66.45	67.41
13	Kab. Sumedang	71.64	71.80	72.69	27	Kab. Tasikmalaya	65.67	65.90	66.84
14	Kab. Purwakarta	70.82	70.98	71.56	28	Kab. Cianjur	65.36	65.56	65.94

(Sumber: Data BPS Jawa Barat, 2023)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat bahwa Indeks Pengembangan Manusia (IPM) Kabupaten Subang pada tahun 2022 memiliki IPM sebesar 69,87 dan berada pada peringkat 20 dari 28 Kab/Kota se-Jawa Barat. Sedangkan dilihat dari beberapa kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, terutama kabupaten-kabupaten yang letak geografisnya berdekatan dengan Kabupaten Subang yaitu Kabupaten Purwakarta, dan Indramayu, diantara tiga kabupaten tersebut, Kabupaten Subang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih rendah daripada Kabupaten Purwakarta.

Pemerintah Daerah perlu mendukung upaya pengembangan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya di wilayah kewenangannya. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas SDM adalah adanya Perguruan Tinggi. Dalam pembangunan sumber daya manusia, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan terakhir. Untuk mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, perguruan tinggi memiliki tujuan dan tanggung jawab yang signifikan. Perguruan tinggi di Indonesia terbagi menjadi dua jenis: Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). PTN adalah perguruan tinggi, menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 6 dan 7 yang mendirikan dan yang sebagai penyelenggaranya adalah pemerintah, sedangkan PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan diselenggarakan oleh swasta. PTN dan PTS berbeda dalam hal pengoperasian dan pada penyelenggaraan Perguruan Tinggi tersebut.

Disamping itu jumlah Perguruan Tinggi di Kabupaten Subang juga masih sangat sedikit. Terlihat dari data PDDIKTI terlihat PTN di Kabupaten Subang hanya satu, sedangkan PTS sebanyak 15 dengan akreditasi rendah (kemendikbud.go.id, 2023). Sehingga peran Pemerintah Kabupaten Subang sangat dibutuhkan. Agar masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya Perguruan Tinggi di daerah. Maka dari itu mahasiswa dan lulusan PTN dan PTS adalah aset bagi pemerintah. Selanjutnya adalah pemberdayaan dan pengembangan SDM masyarakat sangat membutuhkan sinergitas

dengan Perguruan Tinggi. Fungsi perguruan tinggi bagi Pemerintah sendiri adalah sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Dimana perguruan tinggi menciptakan generasi penerus bangsa. Generasi muda ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan dan menghadapi tantangan perubahan zaman.

Penjelasan tersebut menunjukkan betapa pentingnya perguruan tinggi dalam menciptakan generasi muda yang berintegritas, terampil, dan berdaya saing. Dapat dikatakan lulusan dari PTS adalah sebagai “aset” pemerintah pusat maupun daerah. Maka dari itu menjadi bertanggung jawab untuk kedua pihak (Marjan Fuadi, 2021) Pembangunan sumber daya manusia yang menyeluruh membutuhkan kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah sehingga akan menciptakan pengembangan SDM secara komprehensif.

Salah satu strategi yang ditempuh oleh Pemerintah daerah Kabupaten Subang adalah melalui kerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emerson dan Nabatchi, (2015) yang mengemukakan bahwa kolaborasi atau kerja sama merupakan salah satu strategi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Dengan adanya konsep kerja sama aparat pemerintah dapat mengembangkan pola-pola partisipasi, kemitraan, dan kerjasama dalam penyelenggaraan suatu urusan. Kerja sama ini menciptakan sinergi yang menguntungkan, di mana pemerintah daerah mendapatkan akses pengetahuan dan keterampilan dari lembaga pendidikan tinggi, sementara Perguruan Tinggi dapat mengaplikasikan pengetahuan akademisnya di masyarakat.

Selain itu, terdapat kebijakan baru yang dibuat oleh Kemendikbud yaitu program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” (MBKM) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa baik dalam hal *soft skills* ataupun *hard skills* sehingga mereka lebih siap dan sesuai dengan kebutuhan zaman yang akan datang. Program ini juga menuntut kolaborasi yang baik dengan pemerintah. Kemitraan yang efektif akan mencapai pelaksanaan berbagai program MBKM, termasuk pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi meliputi: penelitian dan riset, proyek kemanusiaan, magang atau praktik kerja, studi independen, kampus mengajar, wirausaha merdeka, dan pengabdian masyarakat/kuliah kerja nyata-tematik membangun desa (Dirjen Dikti Kemendikbud, 2020)

Sejalan dengan program LLDIKTI Wilayah IV sebagai lembaga di bawah Sekjen Kemdikbudristek yang memiliki tugas dan fungsi di bidang fasilitasi pengembangan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) ini dapat mengoptimalkan peran LLDIKTI Wilayah IV dalam mendukung sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi. Mendukung terwujudnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka setiap Pemerintah Daerah di Jawa Barat dan Banten harus membuka peluang kerja sama bagi Perguruan Tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Kepala LLDIKTI Wilayah IV, bahwa semua pihak agar dapat mendukung penuh pengembangan kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Pemerintah Daerah (Humas Universitas Djuanda, 2023).

Penelitian tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi maupun pihak lain terkait pengembangan kualitas SDM telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yakni Andisca (2016) mendapatkan hasil penelitian bahwa kerjasama ini dalam pengelolaan Taman Pintar berjalan baik dan meningkatkan motivasi masyarakat terkait pentingnya Pendidikan. Sedangkan Riyanti dan Ma'ruf (2019) mendapatkan hasil penelitian bahwa kerjasama Pemerintah (Dinas Sosial Kota Surabaya) dengan pihak terkait memiliki peran yang besar terhadap pengembangan kualitas SDM yang dibuktikan dengan mampu memberikan nilai manfaat ekonomi maupun sosial kedalam masyarakat. Damayanti (2018) juga melakukan penelitian pengembangan potensi daerah menggunakan Kerjasama *Sister City* antara Pemerintah Kota Semarang dengan Brisbane Australia menunjukkan hasil penelitian yaitu peningkatan SDM dan kesempatan berupa pertukaran pelajar dalam mendorong SDM yang mampu bersaing di skala global.

Tentu adanya kerja sama ini akan bermuara kepada peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Pada saat ini, kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga Perguruan Tinggi bukan hanya sekadar mengajar dan belajar, namun juga berdampak lebih besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh, mempersiapkan generasi muda untuk tuntutan masa depan yang semakin kompleks, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengeksplorasi peran kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Subang. Melalui pemahaman mendalam terhadap dinamika dan keberhasilan kerja sama, penulis akan memberikan pandangan yang komprehensif terkait peran pemerintah dengan focus penelitian menggunakan Teori Peran Pemerintah Siagian (2018) bahwa pemerintah berperan menjadi Stabilisator, Inovator, Modernisator, dan Pelopor dalam pengembangan kualitas SDM.

Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran kerja sama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam mengembangkan kualitas SDM di Kabupaten Subang. Serta diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi pendidikan, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk mengoptimalkan kerja sama serupa dalam rangka memperkuat kapasitas SDM di Kabupaten Subang, dan dengan demikian, meningkatkan daya saing daerah ini dalam skala nasional dan global.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi saat ini dengan memberikan penjelasan, catatan, analisis, dan interpretasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Subang, yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat dengan IPM rendah dari daerah lain. Melalui upaya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang untuk mengatasi persoalan tersebut. Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja sama dari segi akademis. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan, dan data sekunder

berasal dari dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian yang dipilih secara purposive, yaitu informan yang langsung terlibat dalam proses kerja sama pemerintah daerah dengan perguruan tinggi. Fokus penelitian adalah menggunakan teori peran pemerintah Siagian, (2018) yaitu peran kerja sama pemerintah daerah dengan institusi akademik/perguruan tinggi yang berperan langsung dalam peningkatan kualitas SDM.. Analisis data menggunakan teknik analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Metode ini terdiri dari pengumpulan, kondensasi, penyajian, penarikan kesimpulan, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan senantiasa dilakukan oleh pemerintah sebagai implemementasi Undang – Undang tentang Otonomi Daerah untuk mengelola segala sumber daya yang ada di wilayahnya. Sebab pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Maka dari itu melalui kerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi ini dapat membuka peluang untuk mengembangkan potensi dalam daerah. Selain itu, pembentukan kerja sama dapat membantu mencapai tujuan bersama lebih cepat. Tidak disarankan untuk membagi tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing pihak selama proses pencapaian tujuan tersebut. Menurut Nawawi (1984) dalam (Saleh, 2020) kerja sama adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian tugas atau pekerjaan.

Kerja sama Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan. Kerja sama dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga, dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri. Kerja sama ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Dalam kerja sama ini, lembaga/instansi lain dapat memberikan bantuan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia maupun pembangunan di daerah. Sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 8 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Daerah sebagai optimalisasi potensi daerah Kabupaten Subang melalui skema kerja sama dengan pihak lain.

Dengan demikian yang dimaksud peran kerja sama lembaga ataupun instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pengembangan pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Subang adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Bagian kerja sama sebagai bentuk perwakilan dari pemerintah daerah kabupaten Subang. Secara tidak langsung, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Jawa Barat dan Banten adalah lembaga perwakilan di bawah Kementerian Pendidikan yang bertanggung jawab untuk menaungi Perguruan Tinggi di wilayah tersebut, baik negeri maupun swasta. Karena itu, peran LLDIKTI Wilayah IV sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi

Berikut merupakan hasil dan pembahasan hasil temuan data penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan landasan teori Siagian, (2018) yang beruntun untuk

setiap fokus dan sasaran penelitian sebagai berikut

Peran selaku Stabilisator

Menurut Siagian, (2018) Pemerintah selaku stabilisator memiliki peran untuk menciptakan stabilitas sosial dan sumber daya manusia. Menurut hasil penelitian Awaludin, (2019) mengatakan bahwa salah satu cara agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan teori tersebut maka peran kerja sama pemerintah Kabupaten Subang yaitu memfasilitasi kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak eksternal.

Dalam menciptakan stabilitas sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah membuka peluang dengan fasilitasi kerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi. Hal ini dibuktikan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan untuk para mahasiswa di lingkup pemerintahan maupun di instansi/industri yang ada di Kabupaten Subang. Selanjutnya pemberia beasiswa bagi ASN yang akan melanjutkan Pendidikan seperti Beasiswa bagi Dokter RSUD Kab. Subang untuk mengambil program Spesialis di Universitas Padjajaran dan Guru Agama Islam di lingkungan Kabupaten Subang mengambil program PPG di Universitas Islam Gunung Djati Bandung. Hal ini menciptakan stabilitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional Indonesia.

Sejalan dengan Peran Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, sebagai stabilisator LLDIKTI wilayah IV berperan untuk menciptakan harmonisasi antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam sinergi peningkatan mutu Pendidikan Tinggi sehingga menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh LLDIKTI wilayah IV yaitu pertama koordinasi terkait teknis kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Dengan visi bahwa kerja sama ini sangat penting karena dapat menciptakan hubungan sinergis yang memanfaatkan kekuatan kedua pihak untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Kedua melaksanakan monitoring dan evaluasi secara cermat terhadap kinerja perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Hal tersebut seperti pada hasil penelitian oleh Nasution et al., (2021) hal yang sama dilakukan oleh LLDIKTI wilayah I bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perguruan tinggi swasta dapat meningkatkan akreditasinya. Maka melalui proses ini, LLDIKTI wilayah IV dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perguruan tinggi, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas Pendidikan agar terciptanya stabilitas mutu Pendidikan khususnya dilingkup Perguruan Tinggi Swasta sebagai tanggung jawab LLDIKTI wilayah IV.

Peran selaku Inovator

Menurut Siagian, (2018) pemerintah selaku inovator memiliki peran untuk menciptakan inovasi maupun sistem baru dalam pengembangan sumber daya manusia. Menurut hasil penelitian Anwar (2009) startegi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pemerintah bekerja sama dengan Lembaga Perguruan Tinggi dalam menggagas kebijakan maupun program baru.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengembangkan program strategis untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk beradaptasi oleh perkembangan teknologi (kemenko pmk, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui kerja sama telah mendorong adanya inovasi dalam pengelolaan pertanian. Pemerintah berupaya menciptakan teknologi pertanian dengan menggandeng kerja sama antara Institut Pertanian Bogor dan pihak terkait serta didukung oleh Ikatan Alumni IPB bersama menciptakan kampung inovasi. Kampung Inovasi Pertanian adalah pengolahan pertanian seperti padi dan jagung menggunakan penerapan teknologi pertanian yang modern, efektif dan efisien. Semula hanya dapat panen 3 ton per hektare kini dapat menghasilkan 9-10 ton per hektare (kotasubang.com, 2023). Teknologi pertanian dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan menjadi peran penting pemerintah selaku pemangku kebijakan (Machfoedz, 2011). Adanya teknologi pertanian ini dapat menjawab tantangan krisis pangan yang akan datang Hal tersebut sangat disambut baik oleh masyarakat Subang karena memberikan pengetahuan baru terkait teknologi pertanian dan berhasil memberdayakan masyarakat Subang.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV juga telah berperan aktif menjadi inovator dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian, peran yang telah dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV adalah selalu berusaha dalam menciptakan pembaruan dari implementasi kebijakan Pendidikan tinggi. Dengan adanya Kurikulum Merdeka - Kampus Merdeka ini menjadi latar belakang bagi LLDIKTI Wilayah IV dalam menciptakan program baru. Melalui salah satu bentuk implementasi MBKM Mandiri oleh LLDIKTI Wilayah IV ini adalah penyelenggaraan program KKN-Tematik Perguruan Tinggi Mandiri Membangun Desa (PTM2D) yang diikuti oleh 580 Mahasiswa dari 85 Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Barat dan Banten yang ditempatkan di 34 Desa di Jawa Barat dan Banten. Beberapa diantaranya yakni penempatan di Desa yang terletak di Kabupaten Subang seperti di Desa Dayeuhkolot, Desa Sukamandi, Kecamatan Sagalaherang (Fal Ulul Ilmi, 2023). Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wadah aktualisasi diri bagi mahasiswa agar dapat menempatkan dirinya pada masyarakat setelah lulus nanti. Serta mengembangkan potensi daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat secara langsung seperti pengetahuan dan pelatihan. Salah satu Universitas yang berpartisipasi pada program ini adalah Universitas Sangga Buana. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat mengubah lingkungan masyarakat dari perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan sosial, dan kemajuan perkembangan teknologi dengan dukungan dari peran Pemerintah dan akademisi (Farrah et al., 2022).

Peran selaku Modernisator

Pemerintah selaku modernisator menurut teori peran Siagian (2018) adalah memiliki peran untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan pembaharuan. Menurut Achmad (2022) meningkatkan kualitas sumber daya manusia salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi dan menjalin kerja sama dengan mitra potensial

termasuk perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian penelitian Pemerintah Kabupaten Subang telah memfasilitasi kerja sama untuk pengembangan sistem desa wisata dengan metode pemasaran digital yang dikembangkan oleh mahasiswa dari IPB. Salah satunya dapat menjadi potensi yang menunjang pendapatan masyarakat setempat. Menurut Marpaung (2022) pemasaran digital dapat membantu masyarakat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan pemasaran produk dan bersaing dalam era digital. Karena Masyarakat saat ini lebih mudah dijangkau melalui social media sehingga produk masyarakat mudah dipasarkan secara luas.

Sebagai modernisator Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV senantiasa berupaya untuk mengintegrasikan teknologi dan sistem Pendidikan tinggi yang lebih efektif dan efisien serta mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang telah dilakukan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV sebagai modernisator adalah menjalin kerja sama bersama mitra potensial seperti pada bidang sistem informasi yang mendukung pengenalan teknologi modern ke Perguruan Tinggi seperti pembuatan website instansi, sistem akademik mahasiswa, sistem informasi lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Tidak hanya itu pengenalan teknologi juga turut Pemda-Pemda yang ada di Provinsi Jawa Barat dan Banten. Menurut perumusan kebijakan tentang penerapan *e-government* tersebut yang dikemukakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2018) bahwa penggunaan teknologi informasi perlu dikembangkan untuk mengatasi sistem pelayanan publik yang konvensional. Hal ini mencakup peningkatan layanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi, dan pelaksanaan pemerintahan lebih efisien

Peran selaku Pelopor

Menurut Siagian (2018) peran Pemerintah daerah selaku pelopor yaitu menjadi penegak pertama dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada di daerahnya. Menjadi penjembaran informasi terkait bantuan biaya dari perguruan tinggi maupun pihak terkait. Hal ini dapat mendorong masyarakat melanjutkan ke Pendidikan tinggi sehingga terciptanya SDM yang berkualitas

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah daerah Kabupaten Subang selaku pelopor telah menjalin kerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dimana telah ditandatanganinya MoU oleh Rektor UPI dan Bupati Subang terkait pembangunan gedung UPI di Subang. Sebab Kabupaten Subang merupakan wilayah yang strategis untuk dilakukan Tridharma perguruan tinggi dan wilayah yang belum padat seperti UPI di Bandung. Dengan kehadiran UPI di Subang diharapkan untuk membangun kesadaran dan memotivasi masyarakat Subang akan pentingnya melanjutkan ke jenjang Pendidikan tinggi. Harapannya dengan terjalinnya kerja sama dengan UPI di Subang akan menjadi pusat pendidikan, pusat wisata, dan pusat lainnya.

Menurut Badar (2017) dalam Agustina dan Pradana (2023) pembangunan Perguruan Tinggi Negeri di Daerah mampu meningkatkan kualitas SDM masyarakat dalam berbagai bidang, seperti pariwisata dan industri, serta memperluas akses pendidikan di daerah. Melalui upaya ini, dapat berperan dalam meningkatkan kualitas SDM daerah dan mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi wilayah IV yang bertugas menaungi Perguruan Tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten juga berperan sebagai pelopor. Berdasarkan hasil penelitian upaya yang telah dilakukan oleh LLDIKTI wilayah IV sebagai pelopor adalah penggerak kegiatan dengan cara langsung turun ke masyarakat melalui program membangun desa, bersama Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten. Seperti melaksanakan sosialisasi terkait bantuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kuliah tidak harus berasal dari ekonomi keatas tetapi banyak beasiswa yang ditawarkan oleh Kemendikbud seperti KIP-K untuk mahasiswa yang kurang mampu, Beasiswa Unggulan bagi mahasiswa yang berprestasi dsb. Selanjutnya perguruan tinggi bersinergi bersama membangun desa dalam Program Perguruan Tinggi Mandiri Gotong Royong Membangun Desa (PTM GRMD) yang diprakarsai oleh LLDIKTI wilayah IV. Menurut (Yanuarsari et al., 2021) program membangun desa merupakan upaya kolaboratif antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan kualitas sumber daya manusia, sesuai dengan indikator teori peran yang telah diukur mendapati hasil bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV telah melaksanakan peran kerja samanya dengan baik. Hal ini dilihat dari peran selaku stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pemerintah Daerah Kabupaten Subang telah menjalankan perannya dengan baik. Berikut peran yang telah dilaksanakan 1) Peran selaku stabilisator yakni memberikan beasiswa kepada ASN untuk meningkatkan kompetensi, serta peran LLDIKTI Wilayah IV adalah bersinergi dengan Pemerintah Daerah terkait meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan mutu Perguruan Tinggi 2) Peran selaku inovator yakni memfasilitasi kerjasama penciptaan Kampung Inovasi bersama IPB serta peran LLDIKTI Wilayah IV yakni menciptakan program membangun desa atau PTM2D, 3) Peran selaku modernisator yaitu Pemerintah Daerah melakukan kerja sama sebagai tempat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi mahasiswa IPB, sedangkan peran LLDIKTI Wilayah IV adalah dengan memperkenalkan teknologi sistem informasi kepada Perguruan Tinggi dan pemerintah daerah, dan 4) Peran selaku pelopor yakni bekerja sama dengan UPI untuk membangun kampusnya di Subang, serta peran LLDIKTI Wilayah IV yakni melaksanakan sosialisasi terkait beasiswa. Maka dari itu dengan adanya peran fasilitasi kerja sama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang

telah mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Subang. Peran dari adanya kerja sama yang ditunjukkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV merupakan upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia melalui fasilitasi kerja sama yang telah dilaksanakan. Kerja sama yang dijalin dengan beberapa Perguruan Tinggi dapat mengembangkan potensi daerahnya dan memberikan Pendidikan, pelatihan dan pengetahuan baru dari para mahasiswa yang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat/membangun desa.

Adapun saran yang diberikan penulis sebagai pemecahan masalah pengembangan kualitas SDM oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga Perguruan Tinggi di Kabupaten Subang yaitu perlu adanya inovasi program dengan menggandeng Perguruan Tinggi terbaik sekaligus untuk pengembangan potensi daerah dan pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Subang. Kemudian perlu menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi tidak hanya pada perihal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang terbatas pada lingkup Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, mungkin dapat dikembangkan seperti penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses pengembangan kualitas SDM di Kabupaten Subang. Kepada Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk memberikan beasiswa bagi putra-putri terbaik daerah Kabupaten Subang melalui kerja sama dengan perguruan tinggi baik yang di dalam maupun di luar Kabupaten Subang.

DAFTAR PUSTAKA:

- Achmad, N. P. (2022). Potensi Perluasan Kemitraan Internasional Universitas Hasanuddin dengan Universitas dalam Lingkungan ASEAN. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(1).
- Agustina, Y., & Pradana, G. W. (2023). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas. *PUBLIKA*, 11(3).
- Andisca, D. (2016). *Analisis Kerjasama Pemerintah Daerah Dki Jakarta Dengan Yayasan Dharmaranya Tuju Enam Dalam Pembangunan Taman Pintar Pulogadung*. Universitas Diponegoro.
- ANWAR, C. (2009). *Strategi Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Azizah. (2013). Pengukuran Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Mutu Hidup serta Pengaruhnya terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(04), 144–152.
- Badan Pusat Statistika. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://pagaralamkota.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- BPS Jawa Barat. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia Prov Jawa Barat 2021-2023*. <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/123/1/indeks-pembangunan-manusia.html>

- Damayanti, N. (2018). Strategi Pengembangan Kerjasama Sister City Kota Semarang, Indonesia – Brisbane, Australia. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 51–58. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27220>
- Dirjen Dikti Kemendikbud. (2020). *Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/latar-belakang>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating The Productivity Of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix. *Public Performance & Managemen*, 38, 717–747.
- Fal Ulul Ilmi. (2023). *Universitas Sangga Buana Ikuti KKN Tematik PTM2D LLDIKTI IV di Subang*. PAS JABAR. <https://pasjabar.com/2023/09/08/universitas-sangga-buana-ikuti-kkn-tematik-ptm2d-lldikti-iv-di-subang/>
- Farrah, R., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kampung Tematik Home Industry Di Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang. *E-Journal Undip*. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/34839/27331>
- Humas Universitas Djuanda. (2023). *LLDIKTI Wilayah IV Komitmen Dukung Penuh Pengembangan Kerja Sama Perguruan Tinggi Pemerintah Daerah*. <https://www.unida.ac.id/artikel/unida-hadiri-fgd-di-lldikti-wilayah-iv-komitmen-dukung-penuh-pengembangan-kerja-sama-perguruan-tinggi-pemerintah-daerah>
- kemdikbud.go.id. (2023). *Jumlah Data Satuan Pendidikan (Dikti) PER KAB. SUBANG*. <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/dikti/021900/2>
- kemenko pmk. (2020). *Membangun SDM Indonesia Membangun Sinergitas*. <https://www.kemenkopmk.go.id/membangun-sdm-indonesia-membangun-sinergitas>
- kominfo.go.id. (2018). *Upaya Strategis Pemerintah Dorong Pemanfaatan Teknologi Digital*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/15567/siaran-pers-no-311hmkominfo122018-tentang-tiga-upaya-strategis-pemerintah-dorong-pemanfaatan-teknologi-digital/0/siaran_pers
- kotasubang.com. (2023). *Kampung Inovasi IPB di Subang akan Jadi Role Model bagi Daerah Lain di Indonesia*. https://www.kotasubang.com/29189/kampung-inovasi-ipb-di-subang-jadi-role-model-bagi-daerah-lain-di-indonesia#google_vignette
- Machfoedz. (2011). Mewujudkan Ketahanan Berkedaulatan: Reorientasi Kebijakan Politik Pangan. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, 4(2), 9–13.
- Marjan Fuadi, T. (2021). *Hubungan Perguruan Tinggi Swasta Dengan Pemerintah Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)*. <http://jurnal.abulyatama.ac.id/index.php/semduinaya>
- Marpaung, J., Ramli, R. A., Ariyati, Y., & Sinaga, J. B. (2022). Pendampingan Sosialisasi Peran Umkm Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga Di Warga Rw.001 Kecamatan Batu Aji Kelurahan Bukit Tempayan Kota Batam. *Minda Baharu*, 6(1), 91–100. <https://doi.org/10.33373/jmb.v6i1.4022>
- Nasution, E., Sailah, I., & Hermadi, I. (2021). Strategi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara dalam Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Penjaminan Mutu Volume 7 Nomor 1 2021 Lembaga Penjaminan Mutu Issn : 2407-912x (Cetak) Institut Hindu Dharma Negeri Issn : 2548-3110 (Online) Denpasar*, 7(1).
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

- Riyanti, R., & Ma'ruf. (2019). Kerjasama Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya (Studi Pada Dinas Sosial Kota Surabaya). *E-Journal Unesa*, 7(6). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/29178>
- Saleh, C. (2020). MODUL 01 : Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi. In *Pustaka Universitas Terbuka*.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 6 dan 7.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- Yanuarsari, R., Asmadi, I., Muchtar, H. S., & Sulastini, R. (2021). Peran Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam Meningkatkan Kemandirian Desa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6307–6317. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1828>